BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan Pasal 1 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Pemilihan umum di Indonesia sejak 1955 hingga saat ini yang terakhir di Pemilu serentak 2019 mengalami banyak sekali perubahan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, Pelanggaran, maupun manajemen pelaksanaannya. Salah satu ukuran dalam menilai suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. “Boleh dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum itu lebih baik”¹. Namun sebaliknya, “tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap negara”².

Pesta demokrasi ditingkat lokal (daerah) berupa pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati hingga walikota dan wakil walikota.

¹ Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 36.

² *Ibid.*,

Pemilihan kepala daerah serentak (selanjutnya disebut Pilkada) pada tahun 2020 merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness* yang dilaksanakan dalam suasana pandemi Covid-19. Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ketentuan ini menjadi dasar hukum dari pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dasar dari akhir polemik pelaksanaan Pilkada pada masa pandemik COVID-19.

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan menjadi atribut penting bagi negara sebagai organisasi masyarakat yang paling besar. Ketika dihubungkan dengan rakyat, maka rakyat merupakan tempat untuk melahirkan kekuasaan tertinggi. Sehingga kedaulatan rakyat bisa dikatakan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang dipegang dan berada ditangan rakyat. Karena pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat, maka kekuatan politik yang sesungguhnya berada pada rakyat itu sendiri untuk menentukan keterwakilan sekaligus pemimpinnya. Mengingat kasus covid-19 yang semakin merajalela maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020.

Namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Keputusan tersebut tentunya menimbulkan perdebatan di masyarakat. Menyikapi penundaan beberapa tahapan pilkada pada masa pandemic COVID-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Walaupun Indonesia tidak sampai memberlakukan lockdown, namun tak bisa dipungkiri bahwa berbagai sektor di Indonesia juga ikut terdampak utamanya dalam politik, mengingat pada tahun 2020 dijadwalkan agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang melibatkan 270 daerah dengan 105 juta jumlah pemilih. Merujuk ke dalam kajian hukum tata negara darurat, “penentuan keadaan darurat ini masih dalam lingkup *staatsnoodrecht*, dimana negara diwajibkan mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi situasi darurat”³. Implementasi kebijakan tersebut tertuang kedalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar berupa Pembatasan-pembatasan yang mulai dilakukan dan himbuan untuk menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak mulai diterapkan. Yang baru-baru ini pemerintah menetapkan kebijakan larangan

³ Jimly Asshiddiqie, perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 125.

mudik guna memutus rantai penyebaran wabah pandemi covid-19.

Jika melihat secara masif dan komprehensif, akibat dari pandemi ini ternyata berdampak keberbagai lini sektor, salah satunya ialah sektor ketatanegaraan. Kebijakan penundaan agenda ketatanegaraan mulai dilakukan dan menjadi pertimbangan. Dalam hal ini, yang menjadi sorotan adalah ketika pandemi datang pada saat tahun politik yakni agenda pemilihan kepala daerah. Dalam konteks pemilihan kepala daerah Tahun 2020, seluruh aktor pilkada meliputi penyelenggara, bakal calon hingga partai politik sepenuhnya menunggu respon dan sikap tanggap pemerintah terkait dengan keadaan pandemi covid-19. Dengan penentuan status kedaruratan kesehatan, pembatasan interaksi mempersulit pergerakan dan menghambat kinerja penyelenggara pemilu, aksi bakal calon dan pergerakan partai politik meraih masa untuk persiapan agenda penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota di 270 daerah yang akan Pilkada di 2020 juga terhambat.

Pemilu diselenggarakan melalui berbagai tahapan, mulai dari pendataan calon pemilih hingga pelantikan anggota lembaga yang dipilih. Setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk menjamin pelaksanaan pemilu sesuai asas-asas konstitusional, dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur norma dan prosedur pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah penyelesaian pelanggaran pemilu.

Mekanisme ini diperlukan untuk mengoreksi jika terjadi pelanggaran

atau kesalahan dan memberikan sanksi pada pelaku pelanggaran sehingga proses Pemilihan Umum (Pemilu) benar-benar dilaksanakan secara demokratis dan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat. Pemilu tidak pernah lepas dari intrik-intrik politik. Sehingga tidak mengherankan di setiap pelaksanaan Pemilu tidak pernah lepas dari pelanggaran Pemilu baik yang bersifat administrasi, bahkan Tindak Pidana atau yang lazim disebut tindak pidana pemilu. Pilkada dipersiapkan berbagai instrumen hukum dan etik menjaga kualitas dan legitimasi pasangan terpilih, namun pelanggaran yang sering ditemui dalam Pemilu maupun Pilkada berupa Polemik berkaitan DPT, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada, praktik uang yang sulit dicegah dalam Pilkada.

Pelanggaran ini yang diantisipasi oleh Undang-Undang Pilkada dengan membagi jenis pelanggaran pemilu berupa:

- a. Pelanggaran etik;
- b. Pelanggaran administrasi;
- c. Pelanggaran pidana; dan
- d. Sengketa hasil pemilihan umum/pilkada.⁴

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19. Didalam ketentuan Pasal 201A ayat

⁴ Adrian Faridhi, Alexsander Yandra dan Sudi Fahmi, "Model Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan," *Universitas Lancang Kuning*, Pekanbaru, 2020, hlm. 7.

(2) ditegaskan bahwa pemungutan suara Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Desember 2020, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) tentang tahapan, program dan jadwal menetapkan tanggal 9 Desember 2020 sebagai waktu pelaksanaan pemungutan suara.

Dengan diberlakukannya aturan-aturan sektor riil dalam penanganan Covid-19 membuktikan bahwa pemerintah telah serius dalam upaya menangani permasalahan ini dalam aspek legalitas hukum. Namun, faktor penentu keberhasilan tidak hanya karena adanya aturan sebagai legalitas dan kepastian hukum, melainkan ada faktor lain seperti penegakan hukum, aspek kepatuhan hukum dan partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dalam mengikuti prosedur atau protokol kesehatan yang ditetapkan, dan sebagainya. Jumlah Penduduk di Provinsi Jambi pada Tahun 2020 sebanyak 3,55 Juta Jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020 sebanyak 2.419.858 orang dan untuk jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.415.862 Pemilih.

Salah seorang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan potensi pelanggaran saat mengawasi langsung pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur

(Pilgub) Jambi Tahun 2020. Temuan tersebut ketika seorang anggota Bawaslu bersama jajarannya ke Kabupaten Muaro Jambi. Anggota bawaslu mengatakan, potensi pelanggaran tersebut tepatnya di TPS 004 Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, dan TPS 004 Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota. Salah satu yang dicermati daftar pemilih tetap (DPT). Mengingat dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), persoalan daftar pemilih menjadi salah satu yang paling disorot. Dalam PSU ini, ada potensi pemilih belum melakukan perekaman KTP-Elektronik, tapi namanya masuk dalam DPT.⁵

Ketua Bawaslu Jambi mengatakan pihaknya masih menemukan beberapa masalah di lapangan terkait pelaksanaan PSU (Pemilihan Suara Ulang) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jambi. Berdasarkan hasil pengawasan di seluruh TPS yang melaksanakan PSU, Bawaslu Provinsi Jambi mendapatkan tujuh poin terkait pengawasan.

Pertama, perbedaan informasi di daftar pemilih dengan dokumen kependudukan. Bawaslu mencatat terdapat perbedaan informasi pemilih (nomor induk kependudukan) yang tertera dalam DPT dengan kartu tanda penduduk elektroink. Kedua, soal perbedaan informasi di daftar pemilih dengan surat pemberitahuan memilih. Ketiga, berkaitan dengan keterbukaan informasi pemilih. Terdapat TPS yang tidak menempelkan daftar pemilih pada papan pengumuman. Keempat, pemilih TMS tidak dilakukan penandaan. Terdapat pemilih yang sudah meninggal, karena tidak dilakukan verifikasi faktual maka pemilih tersebut belum dilakukan penandaan TMS dalam daftar pemilih. Kelima, pelaksanaan terkait protokol kesehatan. Bawaslu mendapatkan hasil pengawasan adanya penumpukan antrian pemilihan pada saat proses pemungutan suara. Selain itu ada juga TPS yang tidak terdapat petugas karena petugas setempat belum melakukan rapid test.. Keenam, penggantian ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena mengundurkan diri. Terdapat perubahan berita acara KPPS karena ketua KPPS mengundurkan diri. Ketujuh, waktu pelaksanaan memilih. Terdapat dua pemilih dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang hadir

⁵ Felldy Utama, "PSU Pilgub Jambi, Bawaslu Temukan Potensi Pelanggaran di Muaro Jambi", *iNews.id*, Opini, 27 Mei 2021.

sebelum pukul 12.00 WIB.⁶

Mahkamah berpendapat, telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang masif selama berlangsung Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2020. Diantaranya, pemilih yang tidak berhak memilih tapi diberikan kesempatan memilih di sebagian besar TPS se-Provinsi Jambi. Setelah dilakukan pendataan, rata-rata terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak diberikan kesempatan untuk memilih di dalam TPS dengan jumlah pemilih tidak berhak bervariasi minimal 2 orang per TPS. Adapun total Pemilih tidak berhak yang Pemohon temukan berjumlah 13.487 pemilih karena tidak memiliki KTP Elektronik dan belum melakukan rekam data elektronik di Disdukcapil.

Termasuk dalil Pemohon bahwa berdasarkan data BPS Provinsi Jambi mengenai statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 3.624.579 jiwa. Sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Termohon, diketahui pula jumlah nama pemilih di seluruh kabupaten se-Provinsi Jambi adalah sebanyak 2.415.862 jiwa. Menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tersebut beralasan menurut hukum, karena Pemohon dapat memberikan bukti-bukti kuat dan meyakinkan Mahkamah⁷

Termasuk dalil Pemohon bahwa berdasarkan data BPS Provinsi Jambi mengenai statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 3.624.579 jiwa. Sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Termohon, diketahui pula jumlah nama pemilih di seluruh kabupaten se-Provinsi Jambi adalah sebanyak 2.415.862 jiwa. Menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tersebut beralasan menurut hukum, karena Pemohon dapat

⁶ Jaka Hendra Baittri, "Ada Dugaan Pelanggaran PSU Pilgub Jambi, dari Perbedaan Daftar Pemilih hingga Prokes", KOMPAS.com, Opini, 28 Mei 2021.

⁷ *Ibid.*,

memberikan bukti-bukti kuat dan meyakinkan Mahkamah.⁸

Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon serta mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai suara pemilih dan menegakkan asas pemilihan yang luber dan jurdil, Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sejumlah kecamatan wilayah Provinsi Jambi.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak ditengah pademi covid-19 dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur Di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalahdalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apakah pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020?
2. Apakah pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi terdapat pelanggaran?

⁸ Nano Tresna Arfana, “Pilgub Jambi: Pelanggaran Masif, MK Perintahkan PSU di 88 TPS”, MKRI, Opini, 22 Maret 2021.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui apakah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Hukum Tata Negara.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran pemilihan Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

2. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid 19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

‘Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia yaitu sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Corona virus Disease-2019 (COVID-19).⁹

Berdasarkan penguaraan di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis

⁹ <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>

empiris. Menurut Bahder Johan Nasution bahwa penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk:

Mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹⁰

Yuridis adalah mempelajari peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Empiris adalah meneliti pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak di Provinsi Jambi saat pandemi covid 19 berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 pada prakteknya di lapangan.

2. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara ini :

a. Wawancara Langsung

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yang mana penulis telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung dengan Ketua KPU Provinsi Jambi dan Bawaslu Provinsi Jambi.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

b. Penggunaan Kuesioner atau Angket

Secara umum penggunaan angket sebagai instrumen pengumpulan fakta sosial dapat dilakukan dengan kusioner terbuka. “Dalam penyusunannya suatu angket harus disusun sinkron dengan masalah dan tujuan penelitian”.¹¹

3. Sumber Data

Data yang diperoleh adalah dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara dengan informan dan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Diperoleh dengan mempelajari Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, buku buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau

¹¹ *Ibid.*, hlm. 169.

seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.¹² Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berjumlah 88 (delapan puluh delapan) TPS.

Populasi dalam penelitian adalah seluruh TPS yang melakukan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Adapun sampel yang diambil berdasarkan kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap memahami, mengetahui, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang akan diteliti.

Informan dalam penelitian adalah:

1. KPU Provinsi Jambi
2. Bawaslu Provinsi Jambi
5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data sekunder ataupun data primer dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis kemudian secara kualitatif yaitu dengan menganalisa dengan perhitungan sistematis yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

¹²*Ibid*

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

- BAB I:** Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian hukum dan sistematika penelitian guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.
- BAB II:** Tinjauan Pustaka Merupakan tinjauan umum dalam penelitian skripsi ini, yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum, Konsep Pelaksanaan Pemilu Dan Sengketa Pelanggaran Pemilu
- BAB III:** Pembahasan Merupakan bagian inti dalam penelitian skripsi yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari: Pemilihan Gubenur Dan Wakil Gubenur Di Provinsi Jambi saat pandemi covid 19 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan proses penyelesaian pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi
- BAB IV:** Penutup Merupakan bagian akhir dalam penelitian skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.